

Policy Brief

MENUJU INDONESIA MAJU:
TANTANGAN, HAMBATAN DAN
PERAN EKONOMI SYARIAH

2022



MENUJU INDONESIA MAJU: TANTANGAN, HAMBATAN DAN PERAN EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan : Kamis, 18 Safar 1444 H / 15 September 2022 M
Tema : Menuju Indonesia Maju: Tantangan Hambatan Dan Peran
Ekonomi Syariah
Narasumber : Banjaran Indrastomo, Ph.D.

Tujuan Program

Memberikan update informasi terkini seputar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk membantu para pelaku bisnis, akademisi dan praktisi keuangan syariah dalam aktivitas seputar ekonomi syariah di Indonesia.

Problem

Bagaimana peran Ekonomi Syariah dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 sehingga terhindar dan/atau bangkit dari kemungkinan terjadinya resesi ekonomi?

Policy Brief

Ekonomi Syariah hadir dengan tujuan menjadi solusi dalam permasalahan perekonomian di Indonesia. Inflasi dan kebijakan moneter yang tidak tepat merupakan salah satu masalah besar di perekonomian. Terjadinya inflasi di beberapa negara maju memiliki resiko dampak yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia dan salah satunya terjadi di Amerika Serikat. "Kita dihadapkan kenaikan inflasi di beberapa negara maju terutama di Amerika, yang sempat menyentuh angka 9,1 persen" ujar Chief Economist, Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo dalam Economics Talks bersama MES Indonesia. Selain itu tercatat pada September 2022 Inggris mengalami inflasi sebesar 9,4%.

Negara	Inflation Rate (%)			Note Ags-22
	Jun-22	Jul-22	Agg-22 F	
AS	9,1	8,5	7,8	decrease
Euro Area	8,6	8,9	9,1	Increase
UK	9,4	10,1	9,6	decrease
India	7,0	6,7	6,4	decrease
Tiongkok	2,5	2,7	2,8	Increase
Brazil	11,9	10,1	8,7	decrease
Indonesia	4,35	4,94	4,64*	decrease

Gambar 1. Perkembangan Inflasi Global.

Sumber: Bloomberg (2022)

Dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, salah satu hambatan yang dirasakan oleh Indonesia itu dari sisi *supply* yang berhenti terutama pada manufaktur sehingga membuat proses *starting* ekonomi yang tidak mudah. Kesempatan perekonomian bangkit terutama pada sisi manufaktur hanya dapat dilakukan jika seluruh aspek industri pendukung berjalan bersamaan. Kondisi perekonomian saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti, dampak dari adanya pandemi yang terjadi sampai saat ini lalu ada juga dampak dari terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang membuat posisi *demand* tinggi dengan *supply* yang terbatas. Hal ini disebabkan karena Rusia merupakan supplier dalam bahan dasar produksi beberapa negara di dunia, karena Rusia

merupakan salah satu negara pemegang *supply* gas terbesar di dunia.

Kebijakan moneter adalah salah satu cara negara Indonesia dapat bertahan dalam permasalahan ekonomi yang ada, karena kebijakan dapat menjadi stimulus untuk perekonomian dapat terimobilisasi dengan sempurna. Namun, kebijakan moneter ini hanya bersikap sementara dalam mengatasi masalah ekonomi. “harus dilakukan *adjustment* sehingga perhitungan dan lainnya haruslah tepat, dan moneter policy ini harus dapat *adjusting* sesuai dengan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut” ujar Banjaran.

Posisi Indonesia memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan negara maju lainnya, seperti yang disampaikan oleh Banjaran, “posisi indonesia masih dalam posisi aman, karena ditengah berbagai macam negara, kita masih terkendali dalam hal kurs dan juga *demand* serta ekspor dan pasar saham masih bagus”.

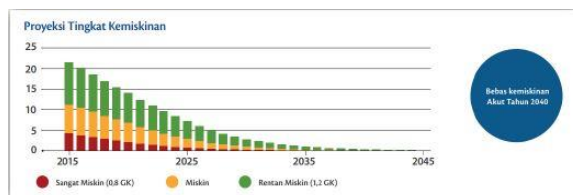


Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perekonomian Indonesia relatif *on-track* jika dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi negara lain dan tak dapat dipungkiri pandemi telah meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu tingkat kemiskinan kita mulai menurun sampai angka 7,57 juta. Serta data yang didapat dari research development yang dikutip dari Banjaran

bahwa ekonomi syariah akan berangsur pulih diatas angka 5% meskipun sampai saat ini pandemi masih terjadi.



Gambar 3. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Sumber: Bappenas

Source of development perekonomian Indonesia saat ini ada di ekspor, “saat ini di tengah tengah permasalahan ekonomi dan isu lainnya ekspor negara Indonesia mencatatkan *trade of high*, dan sudah masuk ke zona yang menggambarkan adanya *recovery* terkait dampak adanya krisis ekonomi akibat pandemi” lanjut Banjaran.



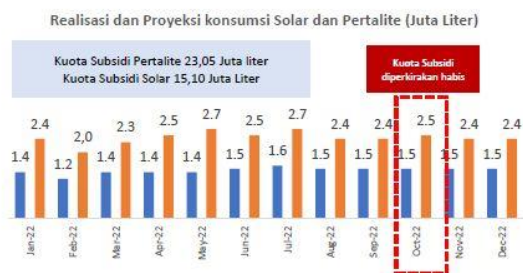
Gambar 4. Pertumbuhan PDB Pengeluaran (% YoY)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Bukan tanpa sebab tetapi karena sektor yang menjadi proporsi utama dunia dalam ekspor adalah sektor komoditas yang itu merupakan salah satu keunggulan Indonesia pada bagian sumber daya terutama batu bara dan kelapa sawit. Namun perlu diwaspadai terkait kondisi ekonomi di tahun 2023, karena adanya kemungkinan akan terjadi stagflasi di tahun tersebut lalu Indonesia juga memiliki kemungkinan pemulihan pada demand di segala sektor, akan tetapi permintaan terhadap

sektor komoditas diproyeksikan tidak akan sekuat pada tahun ini.

Tantangan selanjutnya selain adanya kemungkinan stagflasi, kenaikan harga BBM subsidi pun turut andil menjadi tantangan baru bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar domestik pada awal september 2022 sehingga menyebabkan harga BBM bersubsidi seperti pertalite, solar, dan pertamax mengalami kenaikan dalam rangka pengalihan subsidi.



Gambar 5. Realisasi dan Proyeksi konsumsi Solar dan Pertalite (Juta Liter)

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Sementara untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dexlite justru mengalami penurunan. Naiknya harga BBM bersubsidi menjadi tantangan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Gambar 6. Belanja Subsidi dan Kompensasi Pemerintah (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dalam menciptakan tameng pertahanan dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam sektor sumber daya bahan bakar minyak, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,56 juta kelompok masyarakat yang mencapai total anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Pemerintah juga memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Terakhir, pemerintah memberikan insentif sektor transportasi dengan total anggaran Rp2,17 triliun yang disalurkan sebagai insentif ke sektor angkutan umum, ojek online, nelayan dan sebagainya.

Dalam pemerataan ekonomi Indonesia pasca pandemi dan juga strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sejalan dengan Visi Indonesia Maju 2045 yang dibangun atas 4 pilar utama yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK
 - a. Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata
 - b. Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
 - c. Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
 - d. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
 - e. Reformasi ketenagakerjaan
2. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

- a. Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
 - b. Percepatan industri dan pariwisata
 - c. Pembangunan ekonomi maritim
 - d. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
 - e. Pemantapan ketahanan energi dan air
 - f. Komitmen terhadap lingkungan hidup
3. Pemerataan Pembangunan
 - a. Percepatan pengentasan kemiskinan
 - b. Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
 - c. Pemerataan pembangunan wilayah
 - d. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Demokrasi substantif
 - b. Reformasi kelembagaan dan birokrasi
 - c. Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
 - d. Politik luar negeri bebas aktif
 - e. Penguatan ketahanan dan keamanan

Dalam mencapai Indonesia Maju 2045, Peran Ekonomi Syariah dalam pemerataan pembangunan terutama dukungan Ekonomi Syariah terhadap UMKM, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural ekonomi untuk memaksimalkan potensi bonus

demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*). Prinsip dan praktik yang ideal bagi ekonomi syariah adalah mendorong ekonomi syariah berkontribusi agar negara Indonesia menjadi negara maju. Pak Banjaran pernah melakukan riset dengan Universitas Padjajaran mengenai pemetaan *supplier* produsen dan konsumen dengan menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BPJPH serta memiliki sertifikasi halal sejumlah kurang lebih 7.700 usaha untuk dapat mengetahui ekosistem perekonomian itu seperti apa. Dari hasil riset tersebut ditemukan kesimpulan bahwa Indonesia terlalu berfokus pada konsumen yang menyebabkan konsumsi masyarakat membesar dengan UMKM yang belum berkembang secara maksimal.



Gambar 7. Proyeksi Indonesia Maju 2045

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022)

Kebijakan ekonomi yang disusun juga harus memperhatikan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai lebih dari 95% dari keseluruhan jenis usaha di Indonesia. Prinsip dan praktik Ekonomi Syariah yang ideal memiliki kemampuan untuk mendukung segmen UMKM.

Tidak hanya berfokus pada sektor UMKM, pembangunan industri halal dalam negeri yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia akan Impor dan memperkuat ketahanan

nasional. *Assessment* yang dimulai dari titik kritis menjadi penting karena halal atau tidaknya suatu produk harus dilihat dari keterpaparannya dengan setiap bahan baku, dari hulu hingga hilir terjamin aman dari unsur haram. Melalui metode *assessment* ini, perlu disadari bahwa potensi industri halal sangatlah besar, tidak hanya pada *end-product* tetapi juga dari hulu hingga hilir, baik UMKM maupun usaha besar.

Namun, pemenuhan bahan baku dan barang penolong untuk industri manufaktur dalam negeri masih didominasi oleh impor, sehingga produk impor tidak dapat dipastikan aspek halalnya. Jika industri halal dapat dibangun di dalam negeri, dengan pendekatan *supply chain* dari hulu ke hilir, strategi tersebut juga akan mendorong penguatan ketahanan nasional, khususnya ketahanan pangan bagi industri makanan dan minuman halal.

Golongan Penggunaan Barang Impor	Nilai Impor (Nilai CIF) Menurut Golongan Penggunaan Barang (Juta US\$)		
	2019	2020	2021
Barang Konsumsi	16.454,6	14.656,0	20.182,8
Bahan baku dan barang penolong	126.355,5	103.209,9	147.380,2
Barang Modal	28.465,6	23.702,9	28.627,0
Jumlah	171.275,7	141.568,8	196.190,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 8. Golongan Penggunaan Barang Impor

REKOMENDASI

- Menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan industri baru khususnya pada bidang ekonomi syariah untuk dapat mendorong pendapatan perkapita masyarakat
- Memulihkan daya beli masyarakat

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Impor oleh Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang penolong, yang tentunya belum terjamin halal/tidaknya, sehingga diperlukan strategi substitusi impor. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah strategi hilirisasi dan substitusi impor, strategi ini akan mendorong terciptanya *entrepreneurship* baru khususnya pada segmen UMKM, sehingga cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia dapat terealisasi.

Proyeksi Potensi Industri Halal Indonesia (Triliun Rupiah)			
Sektor Industri Halal	2020**	2021E***	2022E***
Makanan & Minuman Halal	2.088	3.258	3.356
Pariwisata Ramah Muslim	162	51	21
Fesyen Muslim	232	268	309
Farmasi Halal	78,3	116	119
Kosmetik Halal	58	135	139
Media & Rekreasi Halal	319	300	309
TOTAL	2.937	4.128	4.253

Proyeksi Potensi Industri Halal Indonesia (Triliun Rupiah)

Sumber: State of the Global Islamic Economic Report 2022/2021

Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan oleh ekonomi syariah dalam pemantapan ketahanan nasional yaitu dengan mengembangkan industri halal nasional secara optimal Potensi nilai industri halal Indonesia sangatlah besar namun secara riil masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

- Mengoptimalkan industri sektor halal sehingga dapat meningkatkan akselerasi ekonomi syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional
- Mengembangkan rantai dunia halal serta meningkatkan kualitas industri

keuangan perbankan dan non perbankan syariah

- Mengoptimalkan UMKM syariah sebagai penggerak perekonomian
- Meningkatkan literasi keuangan syariah dan ekonomi yang relevan dan kontekstual di masyarakat

- Kepekaan pengambil kebijakan dalam membaca situasi dan perkembangan yang terjadi serta kecepatan dalam menganalisa serta pengambilan keputusan yang bijak oleh pemerintah serta masyarakat